UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Hubungan Realisasi Investasi dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pertambangan di Indonesia
Maya Puspita Sintesa, Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Bahrin. (2004). *Dampak Korupsi terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya.* Dalam: Makalah Pribadi Pengantar Falsafah Sains (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana/S3 Institut Pertanian Bogor.

Boediono. 2002. *Dana Alokasi Umum: Komsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah.* Jakarta: Buku Kompas.

Brodjonegoro, B. (2006). *Desentralisasi sebagai Kebijakan Fundamental Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah di Indonesia.* Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia.

Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Christy, Skolastika. Analisis Hubungan Korupsi dan Pembangunan Manusia untuk Negara-Negara di Dunia Tahun 2010-2014, *Skripsi.* Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Destiana, Luna. (2011). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Skripsi.* Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DPMPTSP. (2017). *Pengertian Penanaman Modal.* Luwu Utara*:* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara. Diakses dari: http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id/berita/393/pengertian-penanaman-modal.html (2 Oktober 2018 16:33)

Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Hubungan Realisasi Investasi dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pertambangan di Indonesia
Maya Puspita Sintesa, Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

H.S, Salim dan Sutrisno, Budi. (2008). Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hardjasoemantri, Koesnadi. (2012). *Tata Hukum Lingkungan Edisi Kedelapan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hayati, Tri. (2015). *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Ilyas, Firdaus; Wasef, Mouna; dan Primayogha, Egi. (2018). *Batubara dan Ancaman Korupsi.* Jakarta: Intrans Publishing.

Jur, Andi Hamzah. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jolianis. (2014). Pengaruh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penerimaan Daerah. *Journal Economic and Economic Education.* Padang: STKIP-PGRI Sumbar.

Kartono. 1992. *Peradilan Bebas.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Hubungan Realisasi Investasi dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pertambangan di Indonesia
Maya Puspita Sintesa, Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang.* Penerbit Erlangga.

Kurniadi, Y. (2011). Dampak Masif Korupsi. In N.T. Puspito, M. Elwina, I.S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (pp55-71). Jakarta: Kemendikbud.

Mahkamah Agung. (2018). *Putusan No. 16/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.* Jakarta: Direktori Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia. diakses dari: http://putusan.mahkamahagung,go,id (Februari 2019)

Malingreau, J. P. 1978. *Penggunaan Lahan Pedesaan Penafsiran Citra untuk In-ventarisasi dan Analisanya.* Yogyakarta: Pusat pendidikan Interpretasi Citra Penginderaan jauh dan Survey Terpadu UGM-BAKOSURTANAL.

Martinussen, John. 1997. *Society, State, & Market: A Guide to Competing Theory of Development. Zed Books*. London.

Mubyarto. (1989). *Ekonomi Dualistik.* Paper Semiar PPSK UGM. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Muta'ali. Lutfi. (2012). *Pendekatan Integrasi Spasial dan Regional Network dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia.* Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Lektor Kepala Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Menteri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.* Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri. (2014). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Hubungan Realisasi Investasi dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pertambangan di Indonesia
Maya Puspita Sintesa, Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Peraturan Kepala. (2015). *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.* Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Pramono, Abdul Ghani. (2016). Peran Badan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung, *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Redi, Ahmad. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan.* Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2014). *Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat.* Jakarta: Gramata Publishing.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Lembaran Negara RI Tahun 1999. Jakarta: Sekretariat Negara.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Hubungan Realisasi Investasi dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pertambangan di Indonesia
Maya Puspita Sintesa, Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Lembaran Negara RI Tahun 2001. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Lembaran Negara RI Tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.* Lembaran Negara RI Tahun 2007. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.* Lembaran Negara RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ritohardoyo, Su. 2013. *Penggunaan dan Tata Guna Lahan.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Saraswati, Susan. (2016). *Penanaman Modal – Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.* Jakarta: Leks&Co Lawyer Firm. Diakses dari: http://hukumpenanamanmodal.com/perizinan-bkpm/penanaman-modal-pedoman-dan-tata-cara-pengendalian-pelaksanaan-penanaman-modal/ (2 Oktober 2018 16:33)

Sari, Winda Andi. (2017). Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Simanjuntak, Frenky; Akbarsyah, Anita Rahman. (2008). *Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Hubungan Realisasi Investasi dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pertambangan di Indonesia
Maya Puspita Sintesa, Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Indeks Suap. Jakarta: Transparency Internastional Indonesia, USAID dan Millenium Challenge Corporation

Spelt, N. M dan J.B.J.M. ten Berge. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan. D*isunting oleh Philipus M. Hadjon. Surabaya: Yuridika.

Suhirman. (2002). *Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Sutedi, Adrian. (2015). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsi Rt, Moch. (2008). Korupsi dan Kemiskinan dalam Perspektif Ketahanan Nasional: Studi tentang Ketahanan Nasional dalam Hubungannya dengan Korupsi dan Kemiskinan, *Tesis.* Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Tarigan, A. (2013). Peran korporasi dalam kejahatan kehutanan. Indonesia Corruption Watch (Ed). *Climate Change: Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan* (pp.9-24). Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK. (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Transparency International. (2018). *Corruption Perspective Index.* Result.

Untung, Hendrik Budi. (2010). *Hukum Investasi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Utari, I. S. (2011). *Faktor Penyebab Korupsi.* In N.T. Puspito, M. Elwina, I.S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (pp. 37-51). Jakarta: Kemendikbud.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Hubungan Realisasi Investasi dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pertambangan di Indonesia
Maya Puspita Sintesa, Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Widiastuti, Tika. (2008). Dampak Korupsi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Beberapa Negara Muslim, *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wiranata, I Gede AB. (2009). *Perkembangan Hukum Penanaman Modal di Indonesia.* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Worster, D. (1977). *Nature's Economy: A History of Ecological Ideas.* Cambridge: Cambridge University Press.

Yunus, Hadi Sabari. (2004). *Pendekatan Utama Geografi: Acuan Khusus pada Pendekatan Keruangan, Ekologis, dan Kompleks Wilayah.* Semarang: Ceramah pada Stadium General, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Yunus, Hadi Sabari. (2009). *Konsep dan Pendekatan Geografi, Memahami Hakekat Keilmuannya.* Dikutip dari http://taufik.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Pendekatan-Geografi-Prof-Hadi-Sabari-Yunus.pdf. 20 Desember.

Yuwanto, Listyo. (2016). Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi.* Integritas, 2, hal. 28.

Zulaiha, Aida Ratna; Anggraeni, Sari. (2016). Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan. *Jurnal Antikorupsi.* Integritas, 2, hal. 1